



BIROKRASI DAN POLITIK KEKERABATAN PADA PEMILU LEGISLATIF 2024 DI KABUPATEN BANGKA SELATAN

Putri^{1*}, Ibrahim², Novendra Hidayat³,

^{1,2,4} Bangka Belitung University, Indonesia

putrithra@gmail.com, iim_babel@yahoo.com, novendra@ubb.ac.id*

*) corresponding author

Keywords	Abstract
Politik Kekkerabatan, Mobilisasi Sumber daya, Birokrasi	Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi terkait bentuk pemanfaatan dan faktor pendorong adanya politik kekerabatan berbasis sumberdaya birokrasi pada pemilihan legislatif di Kabupaten Bangka Selatan. Teori yang digunakan penelitian ini adalah teori kekerabatan oleh Schneider (1968) dan teori mobilisasi sumberdaya oleh Oberschall (1973). Dengan menggunakan metode kualitatif, pendekatan deskriptif dimana sumber data primer didapatkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi sedangkan data sekunder diperoleh melalui bahan pustaka yang dapat mendukung informasi primer diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa bentuk pemanfaatan dari politik kekerabatan berbasis sumber daya birokrasi ini memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan pilihan dan dukungan politik seseorang. Hal tersebut terlihat dari dukungan keluarga yang diberikan melalui mobilisasi sumberdaya. Faktor determinan kemunculan dan keberhasilan dari teori mobilisasi sumber daya ini terdiri dari lima hal diantaranya gerakan organisasi sosial, pemimpin dan kepemimpinan, sumber daya dan mobilisasi sumber daya yang diklasifikasikan menjadi lima jenis yaitu sumber daya moral, sumber daya budaya, sumber daya sosial-organisasi, sumber daya manusia, dan sumber daya material, kemudian jaringan dan partisipasi, serta peluang dan kapasitas masyarakat.

1. PENDAHULUAN

Pemilu serentak di Indonesia pertama kalinya dilaksanakan pada tahun 2019, sejak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.14/PUU-XI/2013 dibacakan, mengenai hal tersebut sistem pemilu mengalami konstruksi demokrasi yang bersejarah. Sebelumnya, pemilihan legislatif dan presiden dilaksanakan secara terpisah. Pemilihan legislatif menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 merupakan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pemilihan legislatif

di Indonesia merupakan bagian integral dari pemilu yang dilaksanakan di seluruh Indonesia (Abra, 2019).

Pemilihan legislatif dalam pemilu serentak di tahun 2024 telah dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali. Pada Pileg tahun 2024 ini, menampilkan begitu banyak peserta/kontestan yang berusaha untuk meraih suara rakyat dan duduk di kursi parlemen, salah satunya kontestan yang memiliki jaringan kekerabatan dengan politisi atau aktor birokrasi. Adanya jaringan kekerabatan menjadikan mereka punya ruang lebih dibandingkan dengan kandidat lainnya. Dinamika terkait adanya ikatan kekerabatan dalam pemilu 2024 sangat terlihat subur dari waktu ke waktu. Trah politik dari pejabat publik yang sedang berkuasa atau pernah menjabat di eksekutif dan legislatif menunjukkan gejala untuk merawat kekuasaan melalui tangan-tangan estafet keluarganya. Fenomena terkait politik kekerabatan ini telah banyak ditunjukkan oleh beberapa daerah di Indonesia salah satunya daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah memasuki zona darurat politik kekerabatan di pemilu 2024.

Dinamika politik di Bangka Belitung juga ditandai dengan adanya faktor politik kekerabatan pada proses pemilu. Hal ini dapat diidentifikasi dari sejumlah Caleg yang memiliki ikatan keluarga dengan birokrasi. Terdapat 27 Caleg yang teridentifikasi pada pemilihan legislatif tahun 2024 memiliki ikatan kekerabatan dari 15 politisi se-Kep. Bangka Belitung yang sedang berkuasa atau yang sudah pernah menjabat di eksekutif seperti Gubernur, Bupati, Walikota, dan ditingkat legislatif seperti DPD RI, DPR RI hingga DPRD. Mengenai beberapa trah politik kekerabatan yang terjadi di lingkaran politisi ini telah memperlihatkan bahwa gejala politik kekerabatan ini sangat mengkhawatirkan. Dalam penelitian Raissoevel (2022) menyatakan bahwa politik kekerabatan merupakan sebuah penghambat bagi masyarakat untuk memenuhi hak-hak sosial serta politiknya dimana masyarakat yang memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam proses politik. Namun adanya praktik politik kekerabatan ini telah memberikan kecacatan pada demokrasi karena telah merubah makna demokrasi bahwa seluruh rakyat mempunyai hak serta peluang yang sama dalam proses politik yang menghasilkan sebuah kekuasaan.

Beberapa faktor yang melatarbelakangi adanya bentuk dari politik kekerabatan yang bersifat destruktif ini diantaranya pertama, terkait aturan hukum yang memungkinkan kebijakan politik kekerabatan itu terjadi. Kedua, sistem kepartaian yang belum demokratis. Dimana peran partai politik dalam menyuburkan dan menumbuhkan kembangkan politik kekerabatan di semua level. Dalam mekanisme pencalonan dalam partai politik, tumbuhnya oligarki atau lingkaran elit di dalam tubuh partai politik telah menunjukkan ketidakwajaran. Ketiga, tingginya biaya atau ongkos politik. Tingginya biaya politik telah membuat politik kekerabatan menguatkan perannya dengan sumber daya ekonomi yang dimiliki, agar mampu memenuhi kepentingan-kepentingan keluarga atas apa yang telah dimiliki. Keempat persepsi masyarakat terhadap politik kekerabatan masih rendah serta kurangnya evaluasi politik kekerabatan. Faktor keempat inilah yang menjadi sebuah alasan mengapa politik kekerabatan begitu populer di negara ini.

Kepopuleran politik kekerabatan saat ini bukan hanya berada di lingkaran politisi eksekutif tetapi juga telah masuk ke dalam birokrasi pemerintahan pada pemilu 2024. Hal

tersebut terlihat dari beberapa keluarga dari aktor birokrasi juga melanggengkan fenomena dan merawat kekuasaan melalui tangan-tangan estafet keluarganya di pemilu 2024. Seperti yang kita ketahui bahwa kekerabatan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi sistem politik dan birokrasi pemerintah. Birokrasi dapat diartikan dalam bahasa Yunani yaitu *Cratein* yang mempunyai arti mengatur dan jika di artikan dalam bahasa Prancis, birokrasi berasal dari kata *bureau* yang mempunyai arti kantor atau meja tulis. Setiawan (2014), berpendapat dalam bukunya yang berjudul "*Rekonstruksi Birokrasi Pemerintahan Daerah*" bahwa birokrasi merupakan sistem kerja pemerintahan demi mencapai tujuan dari Negara secara efektif dan efisien. Oleh sebab itu perlunya objektif dan terbuka, dalam memahami bahwa tata kerja birokrasi ini untuk tujuan bersama bukan bentuk individu atau perorangan. Birokrasi didefinisikan sebagai sebuah organisasi keseluruhan pemerintah yang menjalankan tugas negara dalam berbagai unit organisasi pemerintahan dibawah presiden dan lembaga-lembaga non departemen, baik itu yang di pusat, maupun di daerah seperti halnya di tingkat provinsi, kabupaten, serta kecamatan, kelurahan hingga desa.

Menurut penelitian Rayadi (2014) dalam hubungan politik dan birokrasi, pemilu adalah ujian bagi birokrasi untuk menilai apakah birokrasi sudah berjalan secara profesionalitas dan berfungsi sebagai pelayan publik dan bukanlah sebagai alat kekuasaan yang mudah terkooptasi dengan kepentingan politik kelompok tertentu. Politisi birokrasi dapat dikatakan bersifat resiprokal, dimana adanya hubungan saling mendukung secara politik, baik itu dari pihak birokrasi maupun politisi itu sendiri. Seperti diketahui bahwa politisi membutuhkan birokrasi sebagai sebuah mesin politik dan birokrasi membutuhkan dukungan dari politisi sebagai bentuk sarana penunjang karir.

Masalah terkait politisasi birokrasi menjadi persoalan hampir di seluruh daerah (Suryanjari, 2009). Seperti halnya pada pemilu 2024 ini, tren politik kekerabatan dengan sumber daya birokrasi dengan salah satu parpol atau caleg dalam pemilu 2024 ini akan mudah memberi dukungan. Adanya jaringan kekerabatan seringkali melibatkan birokrasi dalam politik seperti menjadi tim sukses salah satu caleg dan memobilisasi bawahan dan massa di sekitarnya untuk melakukan dukungan kepada calon tersebut. Pemanfaatan suara pegawai birokrasi ini jelas sangat mudah bagi kandidat Keadaan tersebut dilihat dari adanya beberapa praktik-praktik yang terjadi seperti halnya penggunaan sumber daya birokrasi untuk memenuhi kepentingan politik. Mobilisasi pegawai birokrasi saat pemilu/pilkada telah banyak terjadi pada tingkat pemilihan Kabupaten/Kota, Provinsi, hingga pusat (Yunus, 2017).

Penelitian ini difokuskan pada aktor birokrasi yang ada di Kabupaten Bangka Selatan. Seperti yang telah diidentifikasi sebelumnya bahwa politik kekerabatan ini terjadi di seluruh Kepulauan Bangka Belitung, namun Kabupaten Bangka Selatan teridentifikasi bahwa dalam lingkaran birokrasi banyak dari aktor birokrasi yang terjaring dalam politik kekerabatan sehingga memunculkan sifat yang kurang profesional dan menyebabkan bentuk ketidaknetralan birokrasi karena cenderung berpihak dan mendukung keluarganya tanpa melihat kualitas dari kandidat tersebut. Adanya ikatan kekerabatan menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi birokrasi dalam pemilu karena kurangnya profesionalitas

menjadi salah satu masalah serius yang mempengaruhi nilai demokrasi dari pemilih itu sendiri. Para aktor birokrat yang mengedepankan hubungan personal dan menguntungkan bagi salah satu kandidat yang bersangkutan.

Berikut keluarga aktor birokrasi bertarung pada Pemilihan legislatif tahun 2024 di Kabupaten Bangka Selatan, yaitu :

Tabel 1. Identifikasi Politik Kekerabatan Dalam Birokrasi Pada Pemilihan Legislatif 2024 di Kabupaten Bangka Selatan.

Nama	Pemilihan	Kerabat	Jabatan Birokrasi
Bahroni	DPRD Kabupaten	Evi Sastra	Kepala Badan Kesbangpol Kab. Bangka Selatan
Hessy Afrianti	DPRD Kabupaten	Hefi Nuranda	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bangka Selatan
Istiya Marwinda	DPRD Kabupaten	Benny Supratama	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bangka Selatan
Tony Purnama	DPRD Provinsi	Benny Supratama	

Sumber Data: Kelola oleh Penulis, 2024

Kandidat yang memiliki jaringan kekerabatan dengan aktor birokrasi ini akan mendapatkan point lebih dari masyarakat yang dilihat dari latarbelakang keluarga yang dimiliki dengan dukungan melalui mobilisasi sumber daya dari kerabatnya tersebut. Hal inilah yang membuat birokrasi terkadang tidak dapat profesional. Dimana hubungan pegawai birokrasi ikut menjadi bagian dari kekuatan politik bagi salah satu kandiati. Sehingga politik dan birokrasi ini merupakan sebuah ujian di dalam pemilu. Penelitian ini mencoba melihat politik kekerabatan berbasis sumber daya birokrasi terjadi pada pemelihan legislatif pada pemilu 2024 di Kabupaten Bangka Selatan.

Lebih luasnya, melihat bagaimana bentuk pemanfaatan politik kekerabatan berbasis sumber daya birokrasi pada politik kekerabatan yang terjadi pada pemilu 2024 di Kabupaten Bangka Selatan. Dimana saat ini bentuk kekerabatan di dalam birokrasi tidak hanya dilihat dari keluarga yang memiliki hubungan darah/pernikahan saja tetapi kekerabatan yang dilihat dari kedekatan sebagai rekan kerja sehingga terbentuknya rasa kekeluargaan yang saling mendukung. Maka dari itu bentuk kekerabatan di birokrasi dianggap lebih mudah memberikan akses yang lebih besar terhadap sumber daya dan dukungan politik kepada calon politik tertentu.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Politik Kekerabatan merupakan praktik politik yang menempatkan anggota keluarga dan kerabat pada posisi strategis. Dalam kehidupan nyata, politik kekerabatan seringkali dipandang sebagai cara untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan politik dengan mengandalkan ikatan darah dan kekerabatan. Dalam masyarakat modern,

keputusan politik seringkali didasarkan pada pertimbangan rasional dan kepentingan politik yang lebih luas, namun politik kekerabatan tetap menjadi faktor penting dalam beberapa konteks politik.

Konsep politik kekerabatan bertujuan untuk lebih menekankan pada kegiatan politik yang merekrut anggota kekerabatan untuk menduduki jabatan politik. Politik kekerabatan mengacu pada rekrutmen politik yang mengakibatkan anggota keluarga menduduki jabatan politik atau pemerintahan yang tidak didasarkan pada kemampuannya atau melalui prosedur yang telah digariskan, dan lebih cenderung didasarkan pada kekerabatan (baik itu berdasarkan pertimbangan seperti keturunan dan ikatan perkawinan). Konsep politik kekerabatan disini biasanya tidak mengacu pada dinasti monarki yang berlangsung secara turun temurun. Namun dalam konteks demokrasi yang terjadi melalui proses pemilu (Jumrah, 2018).

Pada penelitiannya Faisol, (2018) menyatakan bahwa keluarga adalah unsur utama dari terbentuknya sebuah sistem kekerabatan. Kekerabatan merupakan unit-unit sosial dalam hubungan keluarga dimana dilihat dari dua jenis hubungan, yaitu: hubungan pernikahan dan hubungan darah. Kekerabatan berdasarkan dengan hubungan pernikahan merupakan sistem kekerabatan yang didasarkan pada hubungan antara suami dan istri yang telah diikat dengan status pernikahan. Contoh hubungan kekerabatan ini dapat dilihat antara menantu dengan mertua, kakak ipar dengan anak-anaknya. *Kedua*, Kekerabatan yang didasarkan pada hubungan darah. Sistem kekerabatan ini dikenal dengan sebutan kekerabatan berdasarkan keturunan, atau lebih umum kekerabatan berdasarkan darah. Seperti halnya contoh hubungan kekerabatan ini yaitu hubungan antara anak dengan orang tuanya serta hubungan paman dan keponakannya.

Manusia sebagai sumber daya adalah penggerak organisasi, tanpa adanya sumber daya manusia, organisasi tidak akan berfungsi. Sumber daya manusia merupakan bagian utama di dalam sebuah organisasi apapun bentuknya. Pegawai dalam suatu organisasi sebagai sumber daya manusia. Birokrasi adalah sebuah organisasi yang memiliki sumber daya manusia yang cukup besar jumlahnya dan mempunyai tugas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Birokrasi juga sebagai tatanan organisasi yang terstruktur dan dijalankan dengan aturan-aturan yang jelas, prosedural yang tetap, dan dipimpin oleh seorang yang memiliki kewenangan untuk memberikan perintah kepada bawahannya semata hanya untuk kepentingan masyarakat (Endah & Vestikowati, 2021).

Pengertian birokrasi dalam Perbendaharaan pada abad ke-18 yang berasal dari kata *bureau* berarti meja tulis, maksudnya adalah sebagai suatu tempat yang disana para pejabat bekerja. Konsep birokrasi telah tercantum pada kamus Prancis dalam pendapat seorang ilmuwan sosial Prancis yaitu *de Gournay*. Kamus akademi Prancis (1789) menjelaskan bahwa pengertian birokrasi itu sebagai kekuasaan atau sebuah pengaruh dari para kepala dan staf biro pemerintahan. Akademik Prancis mendapat kata 'birokratik' yang mengarah kepada pengaruh biro pemerintahan. Dalam dunia pemerintahan konsep birokrasi ini diartikan sebagai proses dan sistem yang dibuat secara rasional untuk menjamin mekanisme dan sistem kerja yang pasti, teratur, serta mudah untuk dikontrol (Haedianti, 2018).

Secara etimologis, birokrasi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu *bureau* ditambah *cracy* menjadi kata *bureaucracy*. Pada organisasi negara, birokrasi ini merupakan sebuah mesin dalam penyelenggaraan negara, artinya pemahaman mengenai birokrasi disamakan dengan pemerintahan yang merupakan personifikasi dari negara. Tujuan utama dari birokrasi ini adalah untuk mencapai efisiensi, keteraturan, dan stabilitas dalam pelaksanaan tugas negara (Rusfiana & Supriatna, 2021).

3. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan sebuah metode dalam penelitian yang lebih menekankan pada kedalaman dan kekayaan data penelitian. Metode penelitian kualitatif yaitu datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa memakai teknik statistik. Alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif karena pendekatan ini memungkinkan untuk dilakukannya penelitian secara empiris dimana berfokus pada fenomena bentuk pemanfaatan politik kekerabatan berbasis sumber daya birokrasi pada pemilu 2024 di Kabupaten Bangka Selatan secara mendalam.

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bangka Selatan. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni-September 2024. Penelitian ini dilakukan secara terjadwal dan wawancara dengan informan terkait politik kekerabatan di birokrasi pada pemilihan umum tahun 2024.

3.2 Subjek dan Objek Penelitian

Penelitian kualitatif jika salah satu sumber datanya diperoleh melalui hasil sebuah wawancara, maka peneliti memerlukan peran informan untuk menjawab setiap pertanyaan yang diberikan untuk kepentingan data penelitian. Maka dari itu peran informan sangat penting dan dibutuhkan dalam penelitian sebagai seseorang yang menjadi sumber data. Pada penelitian ini teknik penentuan informan yang dipakai yaitu teknik *purposive sampling* atau sampel bertujuan. *Purposive Sampling* ini merupakan teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu, seperti seseorang yang dinilai paling tahu terkait yang peneliti harapkan (Sugiyono, 2017). Adapun informan dari penelitian ini adalah aktor birokrasi, bawaslu, partai politik, dan masyarakat Kab. Bangka Selatan.

3.3 Data dan Metode Pengumpulan Data

Data primer dan sekunder adalah dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Data primer merupakan sebuah data yang didapatkan langsung oleh peneliti melalui hasil wawancara kepada responden/narasumber dan hasil observasi. Data primer ini merupakan data utama dalam penelitian ini. Dengan pengambilan data secara langsung kepada narasumber yang mana sebagai subjek utama dalam penelitian ini akan memberikan informasi yang relevan di lapangan. Kemudian, Data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber yang sudah ada. Data sekunder sering menjadi data penunjang dalam sebuah penelitian. Data ini diperoleh dari beberapa penelitian lain maupun dari beberapa informasi yang terkait dengan penelitian yang dilakukan seperti

buku, jurnal, media massa, artikel, publikasi ilmiah serta sumber-sumber lain baik dari internet maupun literatur kertas yang relevan dengan substansi penelitian ini.

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah sebuah metode yang dipakai dalam menganalisis data. Analisis data ini merupakan proses secara sistematis mengambil dan mengatur data dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dalam artinya analisis data merupakan proses mengolah dan mendalami data sesuai dengan kebutuhan penelitian. Untuk menganalisis data-data terkait maka penulis menggunakan teknik-teknik analisis data yang bersifat kualitatif, dimana peneliti menganalisis terkait konteks dari telaah pustaka dan hasil pernyataan wawancara yang diperoleh dari informan yang mampu memberikan informasi yang relevan dan akurat sesuai dengan masalah penelitian (Sugiyono, 2017). Menurut Miles dan Huberman menyatakan bahwa dalam aktivitas analisis kualitatif ini dibedakan menjadi tiga yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada masa reformasi sekarang ini, birokrasi sering dijadikan sebuah alat untuk menciptakan dukungan politik mengatasnamakan kekerabatan antara politisasi birokrasi dengan beberapa peserta pemilu legislatif tahun 2024. Pada pemilu 2024 di pemilihan legislatif, tren politik kekerabatan dengan aktor birokrasi menjadi sebuah bentuk keunggulan tersendiri bagi kandidat peserta pemilu untuk memperoleh dukungan. Birokrasi dijadikan sebuah sumber daya yang dimanfaatkan untuk menciptakan arus dukungan massa yang besar dalam pemilu bagi kandidat yang memiliki hubungan kekerabatan dengan aktor birokrasi.

Adapun hubungan saluran kekerabatan yang berbasis sumber daya birokrasi pada penyelenggaraan pemilu sering kali merujuk pada hubungan personal antara individu dengan caleg yang didasarkan pada hubungan keluarga atau afiliasi pribadi. Hubungan keluarga merupakan akses utama dari terbentuknya politik kekerabatan. Dalam hubungan keluarga terdiri dari dua jenis kekerabatan diantaranya yaitu: hubungan pernikahan (*Affinal Kinship*) dan hubungan darah (*Consanguineal Kinship*). Hubungan pernikahan (*Affinal Kinship*) merupakan sistem kekerabatan yang didasarkan pada hubungan antara suami dan istri yang telah diikat dengan status pernikahan. Selain itu hubungan kekerabatan ini seperti menantu dan mertua, kakak ipar atau adik ipar. Kemudian kekerabatan yang didasarkan hubungan darah (*Consanguineal Kinship*) merupakan sistem kekerabatan yang dikenal dengan sebutan kekerabatan berdasarkan keturunan. Seperti halnya hubungan antara orang tua dan anak, hubungan paman dan keponakannya (Jumrah, 2018).

Realita yang terjadi sekarang dalam pemilihan legislatif adanya fenomena yang diselimuti dengan jaringan kekerabatan yang dilihat dari satu keturunan atau satu keluarga. Politik kekerabatan dalam bahasa sederhana dapat dipahami sebagai sebuah rezim kekuasaan politik yang dijalankan secara turun-temurun berdasarkan satu keluarga maupun kerabat dekat (Faisol, 2018). Terdiri dua pendekatan untuk memahami bentuk

pemanfaatan dari adanya hubungan keluarga dalam politik kekerabatan berbasis sumber daya birokrasi diantaranya yaitu sumber daya jaringan dan sumber daya identitas.

1. Sumber Daya Jaringan

Keluarga sebagai sumber daya jaringan yang digunakan untuk memberi dukungan secara lebih luas. Mengenai hal tersebut, struktur keluarga dan klan merupakan bagian dari salah satu jaringan potensial yang dapat diandalkan oleh politisi untuk memobilisasi dukungan. Namun di situasi saat ini klan sangat memiliki pengaruh penting dalam mengatur afiliasi sosial yang dimana keluarga politik akan lebih menonjol di lihat dari jaringan keluarganya yang sebagai aktor birokrasi (Aspinall, 2016).

Ikatan secara emosional tersebut sangat sulit untuk diubah dengan demikian preferensi politik aktor birokrasi di Kabupaten Bangka Selatan dipengaruhi oleh pertimbangan ikatan keluarga. Ketidaknetralan aktor birokrasi dalam dukungan legislatif tersebut mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dan proses pemerintahan karena dukungan yang diberikan tidak didasarkan pada visi-misi dari caleg tersebut namun adanya ikatan kekerabatan yang didasarkan hubungan keluarga. Birokrasi sangat vital mengenai penyelenggaraan negara dan pelayanan publik, sehingga profesionalisme birokrasi mutlak menjadi derap, ruh, serta langkah setiap aparat birokrasi. Politik kekerabatan telah menjadi tantangan bagi birokrasi untuk netral dan kurang profesionalitas. Ada beberapa tipe birokrasi ideal yang diberikan oleh Weber yaitu salah satunya terkait Tipe birokrasi ideal yang dijelaskan oleh Weber bahwa individu pejabat secara personal bersifat bebas akan tetapi dibatasi oleh jabatannya manakala ia menjalankan tugas-tugas atau kepentingan individu dalam jabatannya. Pejabat tidak bebas memakai jabatannya untuk kepentingan dan keperluan pribadinya termasuk keluarganya. Setiap pejabat terletak dibawah pengawasan dan pengendalian suatu sistem yang dijalankan secara disiplin. Melalui tipe ideal yang dijelaskan oleh Weber tersebut mestinya dapat dijadikan acuan dalam membuat model birokrasi yang ideal dan profesionalitas (Firmas, 2011).

Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) memiliki peran penting dalam menanggapi terkait beberapa peraturan mengenai pemilu kepada setiap instansi-instansi pemerintahan daerah di Kabupaten Bangka Selatan. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah dan menjalankan aturan pemilu dengan benar, sehingga terciptanya proses pemilu yang bersifat demokratis, jujur, dan adil. Dalam pengawasan mengenai pilihan politik seseorang bukan ranah Bawaslu. Namun Bawaslu secara aktif mensosialisasikan peraturan pemilu kepada pemerintah baik secara langsung melalui penyebaran x benner maupun melalui stakeholder. Strategi ini dilakukan dengan tujuan memberikan edukasi, pemantauan, dan kerjasama dalam membangun pemahaman bersama dengan pemerintah tentang peraturan pemilu.

2. Sumber Daya Identitas

Keluarga atau klan dapat dianggap sebagai kategori sumber daya identitas seperti halnya kategori lain (etnis, wilayah, agama, budaya dll). Kategori tersebut dibangun

dengan melihat bagaimana setiap individu mendorong diri mereka menjadi bagian dari identitas tersebut. Adanya sebuah identitas ini memperluas jaringan dan ikatan kekeluargaan. Dengan memperluas pendekatan ini jaringan keluarga akan diidentifikasi secara luas dan digunakan secara politis. Sumber daya identitas ini digunakan oleh sebagai atribut politik kekerabatan yang dimanfaatkan untuk melakukan pendekatan sebagai alat pemberi sinyal, seperti halnya bahwa adanya kekerabatan ini akan membawa kandidat yang bersangkutan memiliki dukungan politik secara luas.

Simbol budaya kekerabatan mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, saling membantu, dan menghormati yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Budaya dijadikan sebuah sumber daya identitas yang dimanfaatkan dalam politik kekerabatan berbasis sumberdaya birokrasi dimana budaya bagian dari bentuk kebersamaan yang telah ada di dalam masyarakat. Bentuk politik kekerabatan itu adalah bentuk hubungan yang dinikmati bersama dilihat dari sebuah kebersamaan, keakraban, dan kerja sama. Mengenai hal tersebut memungkinkan telah menjadi budaya di masyarakat sehingga bentuk adanya hubungan kekerabatan dengan sumber daya birokrasi akan mempermudah dalam mendapatkan dukungan melalui kerja sama dan hubungan yang baik.

Sistem kekerabatan adalah salah satu sistem yang memiliki pengaruh besar dalam struktur sosial dalam suatu masyarakat. Kekerabatan merupakan salah satu bagian dari prinsip dasar dalam mengatur individu ke dalam kelompok sosial. Hubungan sosial merupakan identifikasi perilaku timbal balik. Hubungan antar kerabat dan kegunaan sistem ini bertujuan untuk merekatkan hubungan-hubungan dan kerja sama di dalam berbagai macam kehidupan sosial, ekonomi, serta keluarga. Adanya sebuah identitas ini memperluas jaringan dan ikatan kekeluargaan. Pada konteks ini, tradisi dan nilai-nilai budaya memainkan peran penting dalam menentukan siapa yang memegang kekuasaan dan bagaimana kekuasaan tersebut digunakan. Bentuk pemanfaatan kekuasaan melalui politik kekerabatan berbasis sumber daya birokrasi pada pemilu 2024, dapat dilakukan dengan strategi mobilisasi sumber daya yang digunakan oleh aktor birokrat untuk mengorganisir suatu dukungan untuk mencapai tujuan. Disimpulkan bahwa faktor determinan dalam suatu gerakan sosial menurut teori mobilisasi sumber daya ialah:

1. Organisasi Gerakan Sosial

Dalam buku Sukmana (2016), McLaughlin yang menyatakan bahwa ada beberapa hal yang menonjol dari suatu gerakan sosial antara lain harus adanya sistem nilai kebersamaan, perasaan yang sama dari komunitas, adanya norma tindakan, serta struktur organisasi yang jelas. Selanjutnya Killian menyatakan kesimpulannya bahwa pada intinya dalam gerakan sosial mengungkapkan bahwa karakteristik pentingnya yaitu organisasi. Organisasi gerakan sosial dimana struktur organisasi menjadi faktor penting dalam memobilisasi sumber daya dan bergerak bersama dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam konteks politik kekerabatan di Kabupaten Bangka Selatan, jaringan kekerabatan yang kuat sering kali terlibat dalam organisasi terstruktur. Partai politik didirikan dengan tujuan bersama, seperti sebagai wadah yang digunakan dalam proses memenangkan pemilu, mempengaruhi kebijakan publik, dan mewakili adanya kepentingan kelompok

tertentu dalam masyarakat. Melalui partai politik mempermudah melakukan mobilisasi dan menarik dukungan dari masyarakat, mengorganisir kampanye untuk mencapai tujuan politik melalui gerakan sosial. Keluarga atau kerabat yang mempunyai posisi yang strategis dalam birokrasi dapat mempengaruhi jalannya kampanye dalam pemilihan legislatif.

Dukungan dari partai politik atau dikenal dengan istilah modal politik ini merupakan akumulasi modal yang dimiliki dan dipakai oleh kandidat dalam upaya memperoleh kemenangan di arena kontestasi politik. Menurut Casey (2005) modal politik di definisikan sebagai sebuah bentuk modal dukungan dari partai-partai politik di berbagai tingkatan dukungan kepada kandidat yang akan bertarung dalam arena pemilihan. Proses pengusungan calon kandidat di dalam partai politik tidak terlepas dari adanya kepentingan partai politik (Hidayat, 2023). Dalam politik kekerabatan partai politik merupakan bentuk modal politik yang dijadikan wadah untuk melakukan gerakan sosial dalam memperoleh dukungan dan melakukan mobilisasi sumber daya dalam ruang lingkup yang luas.

2. Pemimpin dan Kepemimpinan

kepemimpinan dan pemimpin menurut Oberschall kepemimpinan merupakan sebuah kemampuan dalam mempengaruhi individu atau kelompok dan seorang pemimpin sama halnya dengan penentu dari berjalannya suatu gerakan sosial. Dalam mobilisasi sumberdaya strategi kali ini dimanfaatkan melalui kedudukan yang dimiliki aktor birokrasi untuk dapat dijadikan keunggulan dalam memperoleh keuntungan politik seperti mempererat solidaritas kekerabatan dalam lingkungan birokrasi sehingga dalam politik kekerabatan, sumber daya birokrasi bisa berupa posisi strategi dalam pemerintahan yang digunakan untuk menggerakkan massa. Keluarga atau kelompok elit yang berkuasa cenderung memiliki akses yang lebih besar terhadap sumber daya ini dibandingkan kandidat independen atau kelompok yang tidak terhubung secara kekerabatann dengan birokrasi.

3. Sumber Daya dan Mobilisasi Sumber Daya

Gerakan sosial efektif memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Sumberdaya tersebut meliputi sumber daya moral yang diberikan melalui dukungan politik untuk keluarganya mencalonkan diri pada pemilihan legislatif tahun 2024 di Kabupaten Bangka Selatan. Kemudian sumberdaya kultural, sumberdaya ini digunakan untuk melakukan sosialisasi dan rekrutmen kepada pendukung serta membantu gerakan memelihara kesiapan dan kapasitas mereka untuk tindakan kolektif. Sumberdaya organisasi-sosial yang dilihat dari struktur organisasinya, jaringan, dan kemampuan koordinasi. Dalam politik kekerabatan berbasis sumberdaya birokrasi ini, sumberdaya organisasi-sosial dimanfaatkan dengan memperkenalkan kekerabatannya secara langsung kepada rekan kerja serta jaringan-jaringan yang dimiliki di lingkungan kerja. Lalu, sumberdaya manusia, sumberdaya ini merupakan sumberdaya yang paling nyata dimana sumberdaya ini dapat dilihat dari dukungan keluarganya langsung untuk memberikan suara kepada keluarganya. Terakhir, sumberdaya material, sumberdaya ini dapat berupa modal finansial atau fisik.

Sumberdaya ini mendapatkan perhatian besar karena finansial selalu dilibatkan dengan uang. Dalam analisis politik kekerabatan berbasis sumberdaya birokrasi, sumberdaya ini tidak digunakan karena para aktor birokrat melakukan mobilisasi dukungan tanpa sogokan atau uang. Ungkapan aktor birokrat bahwa mobilisasi hanya dilakukan dengan orang-orang terdekat tanpa ada unsur paksaan.

Dari beberapa mobilisasi sumberdaya yang dilakukan berdasarkan analisis menyatakan bahwa dukungan politik diberikan karena adanya unsur kekeluargaan, namun dukungan tersebut tidak dilakukan secara maksimal karena terhalang oleh jabatan publik yang dapat merusak profesionalitas dari aktor birokrasi tersebut. Sehingga semua kandidat yang terlibat tidak satupun yang duduk dalam kursi legislatif dan tidak menggunakan sumberdaya birokrasi dalam mencari dukungan secara maksimal.

4. Jaringan dan Partisipasi

Jaringan dan partisipasi adalah bagian yang sangat penting dalam suatu gerakan sosial. Keberhasilan suatu organisasi sosial dapat dilihat dari sejauh mana mobilisasi individu dan kelompok dalam mendukung gerakan (Sukmana, 2016). Dalam analisis politik kekerabatan berbasis sumberdaya birokrasi mobilisasi dilakukan dengan mempengaruhi individu untuk memberikan suara dan kelompok dalam mencapai tujuan politiknya yaitu mendapatkan suara bagi keluarganya. Individu dalam hal ini rekan kerja sebagai simpul yang terikat seperti hubungan persahabatan, kekerabatan, kepentingan bersama dll.

5. Peluang dan Kapasitas Masyarakat

Terdiri dari dua perspektif untuk menganalisis dasar. Dua pendekatan tersebut menekankan bahwa kemampuan masyarakat lokal untuk mengorganisir suatu tindakan kolektif tergantung atas sumberdaya, yang utamanya yaitu personel dan dana, namun juga meliputi dukungan moral dan legitimasi untuk membentuk struktur yang lebih bisa bertahan yang dapat digunakan sebagai basis dari tindakan kolektif masyarakat. Politik kekerabatan berbasis sumberdaya birokrasi memandang bahwa masyarakat lokal cenderung memilih kandidat yang memiliki sumberdaya personal dan sumberdaya moral yang mendukung di belakangnya. Adanya ikatan kekeluargaan dengan salah satu aktor birokrasi telah menjadi pengaruh bagi masyarakat untuk menentukan pilihan politiknya dan menjadi nilai lebih dan modal sosial bagi kandidat yang terlibat tersebut.

Menurut Casey (2005) dalam penelitian Hidayat (2023) menyatakan bahwa modal sosial merupakan bagian sumber dari dukungan kolektif, dari adanya jaringan pribadi hingga pengenalan masyarakat terhadap kandidat. Modal sosial terlihat di sekitar kita jika beberapa dari orang berinteraksi antar kelas dalam strata sosial masyarakat. Masyarakat merupakan penentu, karena memiliki hak suara dan hak dukungan untuk memilih kandidat tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan yang didapatkan, politik kekerabatan seringkali dimanfaatkan atau dijadikan sebuah alasan untuk memberikan dukungan kepada kandidat

calon legislatif yang memiliki hubungan keluarga atau kedekatan pribadi. Politik kekerabatan dijadikan sumberdaya jaringan dan sumberdaya identitas dalam bentuk pemanfaatannya. Melalui jaringan kekerabatan tersebut telah menimbulkan tantangan terkait sifat yang kurang profesional bagi birokrasi di pemilihan legislatif tahun 2024. Hubungan kekerabatan telah dijadikan sebuah budaya bagi masyarakat untuk menentukan pilihan dan dukungan politik.

Pemanfaatan politik kekerabatan berbasis sumberdaya birokrasi dilakukan oleh aktor birokrasi dengan cara memobilisasi sumberdaya birokrasi yang ada. Terdiri dari lima faktor determinan gerakan sosial menurut teori mobilisasi sumberdaya Oberschall (1973) diantaranya yaitu pertama organisasi gerakan sosial, Kedua yaitu pemimpin dan kepemimpinan, Ketiga Sumberdaya dan Mobilisasi Sumberdaya, Keempat partisipasi dan jaringan sosial, dan Kelima peluang dan kapasitas masyarakat.

Beberapa faktor yang dijadikan keberhasilan suatu gerakan dalam mobilisasi sumberdaya menyatakan bahwa politik kekerabatan tidak menjamin kemenangan bagi kandidat yang memiliki kerabat atau keluarga di birokrasi, hal tersebut dibuktikan berdasarkan 4 calon legislatif pada pemilihan DPRD Kabupaten dan DPRD Provinsi tidak satupun yang menggunakan politik kekerabatan berbasis sumberdaya birokrasi dalam upaya memperoleh suara di pemilu 2024 Kabupaten Bangka Selatan meskipun memiliki kedekatan dan ikatan keluarga dengan salah satu pejabat publik yang notabennya seorang yang memiliki kuasa dalam suatu organisasi atau birokrasi pemerintahan daerah. Faktor yang melatarbelakangi bahwa aktor birokrasi tidak dapat maksimal dalam memberi dukungan dan mencari suara untuk keluarganya karena terhalang oleh jabatan publiknya. Sehingga mobilisasi sumber daya dilakukan hanya memperkenalkan saja dan secara *face to face* kepada pemilih yang memiliki hubungan dekat sebagai persahabatan, rekan kerja, dan kekerabatan.

REFERENSI

- Abra, E. H. (2019). Pemilu Serentak Di Indonesia (Antara Original Intent Dan Implementasi). *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 1(1), 34–49.
- Aspinall, E. (2016). *Understanding Family Politics: Successes And Failures Of Political Dynasties In Regional Indonesia*. *South East Asia Research*. 1-16
- Endah, K., & Vestikowati, E. (2021). Birokrasi Pemerintahan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. *Jurnal Moderat*, 7(3), 648.
- aisol, (2018). *Peran Kekerabatan Dalam Pemenangan Pemilihan Kepala Desa Bungurasih Tahun 2016*. Skripsi UIN Sunan Ampel.
- Firnas, M.A (2011). Evaluasi Reformasi Birokrasi: Masalah Politisi Birokrasi Dalam Politik Indonesia. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS*, Vol. 5, No. 2.
- Haedianti, (2018). *Dampak Politisi Birokrasi Pasca Pemilihan Kepala Daerah Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu*. *New England Journal of Medicine*, 372(2), 2499–2508. Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Hidayat, N & Fatah, A (2023). Relasi Kuasa Etnis Melayu dan Tionghoa Pada Pilkada Kabupaten Bangka Barat 2020. *Nahkoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 22 No. 2, 151-164.
- Jumrah, (2018). *Politik Dinasti Dan Monopoli Kekuasaan (Studi Terhadap Berkuasanya*

- Bangsawan Bima Di Pemerintahan*). Skripsi UIN Alaudin Makassar.
- Raissoevel, N. F. (2022). *Pengaruh Politik Dinasti Terhadap Pemenuhan Hak Politik Warga Negara (Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah Kota Surakarta Tahun 2020)*. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah.
- Rayadi, R.M & M, E. (2014). Politisasi Birokrasi Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Studi Mobilisasi Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011)". *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 1–14.
- Rukajat, (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Yogyakarta. CV Budi Utama.
- Rusfiana, Y., & Supriatna, C. (2021). *Memahami Birokrasi Pemerintahan Dan Perkembangan*. Bandung. Alfabeta, 148.
- Setiawan, I (2014). *Rekonstruksi Birokrasi Pemerintahan Daerah*. Indonesia. Irfan Setiawan.
- Siswandi, D. (2020). *Peran Jaringan Kekeperabatan Dalam Praktik Politik Lokal di Desa Banyulegi*. Skripsi Universitas Negeri Semarang.
- Sugiyono, (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Sukmana, O. (2016). *Konsep Dan Teori Gerakan Sosial*. Malang. Intrans Publishing.
- Suryanjari, E. (2009). Catatan Kritis terhadap Politisasi Birokrasi dalam Pemilu. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS*, 3(1), 55–63.
- Yunus. (2017). Politisasi Birokrasi pascapemilihan Kepala Daerah (Pilkada) (Studi Kasus di Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara). *Skripsi*, 1–89.